



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **IMAM MASKUR**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **460261**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 4.615.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
2. Tanah Seluas 312 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/300 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 270.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/180 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
6. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 570.000.000
7. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 400.000.000
8. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 360.000.000
9. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 450.000.000
10. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
11. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
12. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp.



1.150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

81.000.000

1. MOTOR, YAMAHA V-IXION SPM Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

6.000.000

2. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.

75.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp.

---

**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp.

55.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

---

Sub Total

Rp.

4.751.000.000

**III. HUTANG**

Rp.

405.550.516

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

4.345.449.484

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.